

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

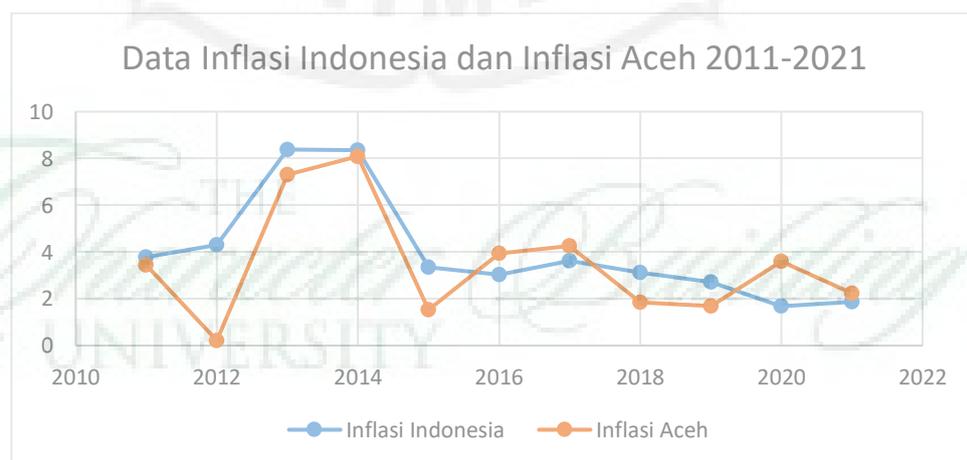
Struktur perekonomian di negara berkembang umumnya sangat rentan terhadap guncangan yang mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian. Apabila terjadi ketidakstabilan perekonomian di negara berkembang maka akan timbul masalah perekonomian seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi sehingga untuk menganalisa permasalahan tersebut makro ekonomi dapat berperan penting dalam menganalisa dan menargetkan sebuah kebijakan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Menurut Rahardja dan Manurung (2008) pemerintahan akan dianggap gagal apabila pemerintahan tersebut tidak berhasil mengatasi permasalahan inflasi dan pengangguran.

Pengangguran dan inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro, perubahan dalam kedua indikator ini dapat berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua tujuan para pembuat kebijakan ekonomi untuk menciptakan kestabilan ekonomi yaitu menciptakan inflasi yang stabil dengan tingkat pengangguran yang rendah. Namun pada analisis kebijakan moneter. A.W. Philip menyatakan bahwa antara inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang kuat dan stabil. Dalam pertumbuhan perekonomian yang berjalan dengan pesat dapat mengakibatkan berkurangnya masalah pengangguran namun menyebabkan meningkatnya inflasi (Mankiw, 2020). Hal ini terjadi karena dalam jangka pendek apabila terjadi peningkatan inflasi maka pengangguran akan menurun. Ketika jumlah pengangguran menurun maka tingkat upah akan meningkat. Pada saat upah

meningkat akan menyebabkan kenaikan permintaan agregat dan kenaikan permintaan agregat ini akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga sehingga terjadilah inflasi (Dornbusch, dkk, 2008). Fenomena di atas dikenal dengan istilah “Teori Kurva Philip” yang menggambarkan terjadinya trade-off antara pengangguran dan inflasi.

Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum yang terjadi secara terus menerus (Sukirno, 2011). Setiap negara atau daerah pasti mengalami inflasi, faktor-faktor yang menyebabkan inflasi di suatu daerah berbeda-beda. Oleh sebab itu pemerintah setempat harus mampu menganalisa dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan inflasi tersebut. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inflasi ialah pengangguran, ekspektasi inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan pendapatan suatu negara atau daerah (PDB/PDRB).

Grafik berbandingan inflasi Indonesia dengan Inflasi Aceh pada periode 2011-2021 sebagai berikut:

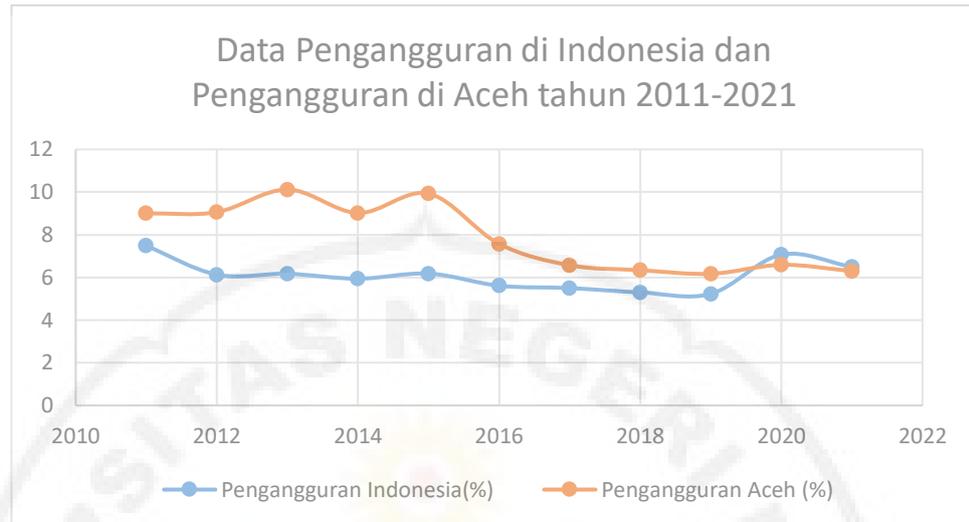


Sumber. Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1. Grafik Inflasi Indonesia dan  
Inflasi Aceh 2011-2021**

Menurut data inflasi Indonesia dan Inflasi Aceh dapat terdapat kesimpulan bahwa inflasi di Indonesia dan Aceh terus berfluktuasi. Diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 inflasi di Indonesia cukup stabil walau pada masa itu Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemik Covid 19 sama halnya dengan inflasi Aceh yang juga stabil walau mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2020 pada saat terjadi gejolak perekonomian global karena pandemi Covid-19 inflasi Indonesia cenderung stabil namun tidak dengan tingkat inflasi di Provinsi Aceh yang cenderung meningkat.

Menurut Sumarsono (2009) Angka pengangguran merupakan jumlah presentase pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Dan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan tetapi tidak sedang mempunyai pekerjaan disebut pengangguran. Badan Pusat Statistik Indonesia merilis tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2022 di Provinsi Aceh tercatat sebagai tingkat pengangguran tertinggi yakni berada pada peringkat 8 besar dari 34 provinsi di Indonesia. Dan diketahui presentase pengangguran di wilayah Aceh cenderung lebih tinggi di bandingkan dengan tingkat pengangguran di Indonesia, namun walau demikian tingkat pengangguran di Aceh terus mengalami perkembangan yang baik karena terus mengalami penurunan yang signifikan mulai pada tahun 2016 sampai tahun 2021. Pebandingan tingkat pengangguran tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

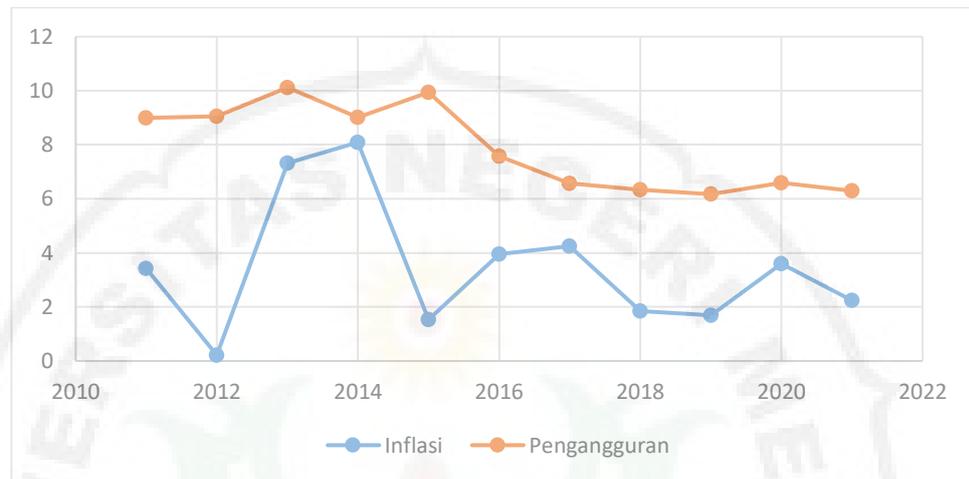


Sumber. Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2. Grafik Pengangguran di Indonesia dan  
Pengangguran di Aceh 2011-2021**

Perkembangan perekonomian daerah Provinsi Aceh pada triwulan IV 2021 tumbuh sebesar 7,39% (yoy), cukup tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,01% (yoy). Sedangkan inflasi di Provinsi Aceh mengalami peningkatan karena tren peningkatan harga emas dan ketidakpastian global akibat Covid-19 varian Omicron. Untuk prospek perekonomian di Provinsi Aceh diperkirakan tumbuh 3,42% - 4,22% (yoy). Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh tercatat 6,30% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2022). Dan dari perkembangan perekonomian tersebut sudah tergambar bahwa perekonomian di Provinsi Aceh sudah mulai membaik dari keterpurukan akibat pandemi covid-19.

Berikut gambar grafik tingkat Inflasi, dan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2011-2021 yaitu:



Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

**Gambar 1.3. Grafik Inflasi dan Pengangguran  
Di Provinsi Aceh 2011-2021**

Hubungan antara pengangguran dan inflasi menurut teori kurva Philips menggambarkan terjadi hubungan negatif atau trade off antara pengangguran dan Inflasi. Inflasi dan pengangguran dapat berhubungan positif apabila inflasi yang di perhitungkan adalah inflasi harga-harga produk secara umum (Lubis, dkk 2018). Dan dari grafik di atas hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi hal tersebut tidak terlihat sehingga fenomena diatas tidak sesuai dengan teori kurva Philips. Hal tersebut juga di dukung dengan hasil penelitian Afriandi, Mike Triani (2019) ditemukan bahwa Terjadi ketidaksesuaian teori kurva Philips di Indonesia (tidak terjadi Trade Off). Dan penelitian Isep Amas P. (2020) yang menyatakan bahwa pada kurun waktu 1996-2018 Indonesia memperlihatkan tidak adanya hubungan trade off antara pengangguran dan inflasi sebagaimana yang digambarkan dalam kurva Philips.

Dengan keadaan perekonomian nasional yang menjadi permasalahan selanjutnya ialah bagaimana cara mewujudkan serta menjaga kestabilan nilai rupiah (tercermin dari tingkat inflasi). Untuk mempercepat usaha pemulihan perekonomian keakuratan ekspektasi inflasi sangat di perlukan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Zahrah, dkk (2019) dan Hakim (2012) yang menyatakan bahwa ekspektasi inflasi berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Namun menurut hasil penelitian Nawatmi dan Nusantara (2017) ekspektasi inflasi hanya signifikan pada jangka pendek dan jangka panjang pada priode krisis 1998, sebelum priode krisis 1998 dan hanya berpengaruh signifikan pada jangka pendek di priode sesudah krisis 2008.

Menjaga kestabilan nilai rupiah berpengaruh terhadap inflasi. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat tinggi maka akan meningkatkan nilai tukar yang akan menyebabkan inflasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Zahrah (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia sebesar 97,36%. Sedangkan menurut hasil penelitian Susmiati, dkk (2021) dan Rumondor, dkk (2021) menyatakan bahwa jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

Menurut Sukirno (2011) dalam analisis makro tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah atau negara yang di capai diukur dari perkembangan pendapatan nasional rill suatu negara atau daerah yang di ukur dari nilai tambah (*value added*) sektor-sektor ekonomi wilayah bersangkutan yang secara total di kenal sebagai Produk Romestik Bruto (PDB) atau Romestik Regional Bruto (PDRB). Menurut teori Keynes kenaikan PDB atau PDRB dari sisi pengeluaran akan menyebabkan permintaan masyarakat sangat meningkat dan ketika jumlah

barang dan jasa meningkat melebihi jumlah maksimal dari barang-barang yang diproduksi maka akan menimbulkan kenaikan harga barang atau inflasi.

Berikut tabel PDRB dengan harga konstan di Provinsi Aceh tahun 2011-2021 yaitu:

Tahun	PDRB (Milyar Rupiah)
2011	108218
2012	114552
2013	121331
2014	127897
2015	129093
2016	136844
2017	145807
2018	155911
2019	164168
2020	166377
2021	184976

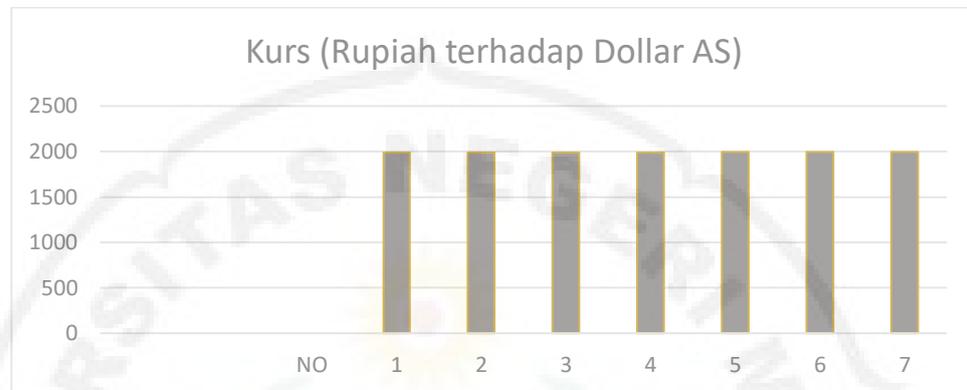
Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

**Table 1.1. PDRB Provinsi Aceh 2011-2021**

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Trend PDRB provinsi Aceh cenderung naik sedangkan pada periode yang sama inflasi Aceh terus mengalami fluktuasi. hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu Huruta dan Sasongko (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara PDRB dengan Inflasi.

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai hubungan inflasi dan nilai tukar ialah teori paritas daya beli atau Purchasing Power Parity. Dalam teori ini nilai tukar diantara dua negara seharusnya sama dengan rasio tingkat harga pada kedua negara tersebut. Sehingga meningkatnya inflasi yang diakibatkan meningkatnya harga domestik akan diikuti oleh depresiasi pada mata uang suatu negara di pasar uang luar negeri. Diketahui bahwa fluktuasi nilai tukar data memengaruhi sebuah

prokonomian (Ruslan,2011) berikut merupakan data nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar yang terus berfluktuasi pada tahun 2011-2020:



Sumber. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

#### **Gambar 1.4. Grafik Kurs Provinsi Aceh tahun 2011-2020**

Dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS mengalami fluktuasi disetiap tahunnya namun pada tahun 2013 dapat terlihat jelas terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup tinggi yaitu dari Rp 9.670 pada tahun 2012 menjadi Rp 12.189,- pada tahun 2013 dan salah satu faktor penyebabnya ialah karena terjadi kenaikan harga BBM pada Juni 2013 sesuai dengan peraturan Menteri ESDM No 18/2013. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Provinsi Aceh, pada tahun yang sama yaitu 2013 inflasi naik 1,06 % dari 9,06 menjadi 10,12 sehingga tingkat inflasi naik menjadi inflasi sedang. Dari hal yang telah dijabarkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori Paritas Daya Beli sesuai dengan fenomena yang ada pada tahun 2013, ketika terjadi depresiasi nilai mata uang maka akan menaikkan tingkat inflasi. Fenomena di atas sesuai dengan hasil penelitian Ferayanti, dkk (2014) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Kurs dengan inflasi.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat Inflasi dan mengujian teori kurva Philips dapat menjadi acuan dalam menentukan sebuah kebijakan-kebijakan ekonomi terutama dalam mengendalikan inflasi, sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti apakah teori kurva Philips sesuai dengan keadaan Inflasi di Provinsi Aceh atau sebaliknya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Analisis Inflasi Dengan Pendekatan Kurva Philips Di Provinsi Aceh*”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2020 saat terjadi gejolak perekonomian global inflasi Indonesia cenderung stabil di bandingkan dengan tingkat inflasi Provinsi yang mengalami peningkatan.
- 2) Tingkat Pengangguran di provinsi Aceh cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2011- 2021.
- 3) Dalam jangka panjang ekspektasi inflasi tidak berpengaruh terhadap inflasi pada periode sesudah krisis 2008.
- 4) Jumlah uang beredar tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap inflasi.
- 5) Trend PDRB provinsi Aceh cenderung naik namun tidak dengan tingkat inflasi yang selalu berfluktuasi.
- 6) Terdapat hubungan positif antara kurs dan inflasi pada tahun 2013 di provinsi Aceh, terjadi depresiasi nilai tukar yang cukup tinggi pada tahun

2013 yaitu dari Rp 9.670,- pada tahun 2012 menjadi Rp 12.189,- dan pada tahun yang sama yaitu 2013 inflasi naik 1,06 % dari 9,06 menjadi 10,12.

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya befokus untuk mengkaji mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi Inflasi dengan pendekatan Kurva Philips pada perekonomian di Provinsi Aceh Priode dimulai dari tahun 1988 sampai dengan 2021. Serta batasan variabel pada penelitian ini ialah variabel inflasi, pengangguran, ekspektasi inflasi, jumlah uang beredar, PDRB, dan nilai tukar.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pengangguran terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh?
- 2) Bagaimanakah pengaruh ekspektasi inflasi terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh?
- 3) Bagaimanakah pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh?
- 4) Bagaimanakah pengaruh PDRB terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh?
- 5) Bagaimanakah pengaruh nilai tukar terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh?

### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

- 1) Menganalisa pengaruh pengangguran terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh.
- 2) Menganalisa pengaruh ekspektasi inflasi terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh.
- 3) Menganalisa pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh.
- 4) Menganalisa pengaruh PDRB terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh.
- 5) Menganalisa pengaruh nilai tukar terhadap inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang di Provinsi Aceh.

### 1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada:

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan gambaran bagi Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengambil sebuah kebijakan untuk mengendalikan inflasi dan tingkat pengangguran di Provinsi Aceh sehingga permasalahan perekonomian dapat teratasi dengan baik.

- 2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sebuah rujukan dalam menambah sebuah wawasan ilmu pengetahuan terkhususnya mengenai dinamika Inflasi di Provinsi Aceh dengan pendekatan kurva Philips.